STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI ONLINE RAKYAT (LAPOR)

	Nomor SOP	500.12.12.3/182/II/Diskiminfo/2023		
TANAH LAUT	Tanggal Pembuatan	1 Februari 2023		
***	Tanggal Revisi	3 Februari 2023		
	Tanggal Efektif	6 Februari 2023		
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika DiNAS KOMINICALI Z DIS H. Haseip Irlanta NIP. 19630720 198503 1 015		
BIDANG KOMUNIKASI SEKSI KEMITRAAN, PEMYIARAN DAN INFORMASI PUBLIK	Nama SOP	Pengelola Pengaduan melalui LAPOR oleh Admin Koordinator dan Admin Pejabat Penghubung		
DASAR HUKUM	Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Memiliki pemahaman mengenai pengelolaan pengaduan melalui			
2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan	aplikasi SP4N LAPOR!			
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2. Mampu mengoperasikan Komputer			
3. Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	3. Memiliki pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat			
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24	Daerah			
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional				
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun				
2015 tentang Roadmap Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional				
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengelolaan Pelayanan				
Publik Melalui Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. Pengintegrasian seluruh pengaduan kedalam sistem LAPOR oleh Admin Koordinator	1. Komputer			
2. Pengintegrasian seluruh Pengaduan kedalam sistem LAPOR oleh Pejabat Penghubung	2. Akses Internet			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
 Laporan yang tidak lengkap tidak bisa ditindaklanjuti Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penanganan pengaduan tidak bisa dilaksanakan 	semua pengaduan harus dicatat dan diarsipkan baik secara manual maupun elektronik			

Tindak lanjut Pengaduan kedalam sistem LAPOR oleh Pejabat Penghubung Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		ADMIN SKPA	PEJABAT PENGHUBUNG/ ATASAN LANGSUNG SKPA	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Laporan diterima melalui kanal diluar LAPOR dari Pejabat Adm Koordinator Provinsi Aceh	\Box		kanal pengaduan internal di akses oleh Admin SKPA	15 menit	pengaduan melalui kanal internal diluar kanal LAPOR	
2.	Laporan diverifikasi oleh SKPA			kanal pengaduan internal di akses oleh Admin SKPA	15 menit	pengaduan telah di verifikasi untuk di tindak lanjuti	
3.	Laporan disampaikan kepada pejabat penghubung oleh admin SKPA untuk di tindak lanjuti		—	pejabat penghubung mendapatkan	15 menit	Laporan diterima oleh Pejabat Penghubung	
4.	Pejabat penghubung menginput Laporan menggunakan form manual LAPOR: Jika Laporan tersebut telah selesai ditindaklanjuti, maka pejabat penghubung menginput jawaban pengaduan didalam form manual			hasil tindak lanjut untuk di masukkan dalam aplikasi LAPOR	1- 2 hari	hasil tindak lanjut pengaduan	
5.	Admin LAPOR SKPA menginput hasil tindak lanjut pengaduan untuk dimasukkan kedalam aplikasi LAPOR			Laporan terinput kedalam sistem LAPOR	15 menit	Menerima Laporan yang didisposisi oleh Admin Koordinator	
6.	Pejabat Penghubung memantau Laporan yang akan didisposisikan oleh Admin Koordinator			Laporan terinput kedalam sistem LAPOR	setiap bulan	rekapitulasi laporan pengaduan	
1 1	TOTAL WAKTU						